

BUDAYA ORGANISASI, PERILAKU DISFUNGSIONAL DAN KINERJA PADA TAHAP PERENCANAAN ANGGARAN

S. Hikmah Jamil

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Ilmu Keislaman Annuquyah, Indonesia
Email: shikmaljamil@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to explained the effect of dysfunctional behavior as mediator variabel that correlated organizational behavior and public servant performance. This research use explanatory research, objected to local government of Sumenep, Indonesia. This research use a quantitative approach, with data collection techniques using questionnaires. The population in this study were all structural officials who worked in the official offices in Sumenep Regency which consisted of 16 official offices. From 317 questionnaires distributed to respondents, only 162 questionnaires can be processed and become research samples. Data were analyzed using Partial Least Square (PLS). The result showed no effect of participation budgeting on the performance of the apparatus either directly or through the dysfunctional behavior as a moderating variable. While the organizational culture give effect to the performance of the apparatus and dysfunctional behavior directly. This research found that dysfunctional behavior has not been able to moderate the relation of budgeting participation and oganizational culture on the performance of local apparatus. Organizational culture can effect the performance of the officers and officials dysfunctional behavior. Organizational culture give more effect to the participation of budgeting on the performance of local apparatus.

Keywords: *participatory budgeting, organizational culture, dysfunctional behavior, apparatus performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh perilaku disfungsiional sebagai variabel mediator yang mengkorelasikan perilaku organisasi dan kinerja pegawai negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori, dengan menggunakan Pemerintah Daerah Sumenep, Indonesia sebagai obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pejabat struktural yang bekerja di kantor dinas di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 16 kantor dinas. Dari 317 kuesioner yang disebar kepada responden hanya 162 kuesioner yang dapat diolah dan menjadi sample penelitian. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh penganggaran partisipasi pada kinerja aparatur baik secara langsung atau melalui perilaku disfungsiional sebagai variabel moderasi. Sedangkan budaya organisasi memberikan pengaruh terhadap kinerja aparatur dan perilaku disfungsiional secara langsung. Penelitian ini menemukan bahwa perilaku disfungsiional belum mampu memoderasi hubungan partisipasi penganggaran dan budaya organisasi pada kinerja aparatur lokal. Budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja perilaku disfungsiional petugas dan pejabat. Budaya organisasi memberi pengaruh lebih besar pada partisipasi penganggaran pada kinerja aparatur lokal.

Kata kunci: penganggaran partisipatif, budaya organisasi, perilaku disfungsiional, kinerja aparat

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan desentralisasi, setiap daerah memperoleh kewenangan yang luas dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, dapat meningkatkan akuntabilitas kepada publik. Karena penganggaran dalam sektor publik bisa diakses dan bersifat terbuka. Penganggaran sektor publik adalah salah satu tahapan yang cukup rumit dan terdapat nuansa politik yang sangat tinggi. Berbeda dengan sektor swasta yang nuansa politiknya lebih kecil. Nuansa politik meliputi keterlibatan eksekutif maupun legislatif yang cenderung mempermainkan alokasi dana yang dianggarkan dan dijadikan sebagai alat tawar-menawar kepentingan yang sifatnya politis. Keterlibatan pejabat tersebut disebabkan perilaku oportunistik dari individunya. Anggaran yang semestinya digunakan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata hanya imajinasi belaka (Batubara, 2014)

Anggaran berfungsi sebagai alat pengendali biaya, penentu bidang masalah dalam suatu organisasi dengan cara menilai hasil kinerja yang dianggarkan secara periodik. Supaya anggaran terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam proses penyusunan anggaran dibutuhkan kerjasama antara pegawai dan manajer. Dikarenakan dalam proses penyusunan anggaran yang sangat kompleks, maka kemungkinan adanya dampak fungsional dan disfungsional terhadap perilaku anggota organisasi dapat terjadi. Untuk mencegah hal tersebut dengan cara mengikutsertakan bawahan untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran sangat dibutuhkan supaya anggaran bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Partisipasi adalah proses pengambilan keputusan oleh dua pihak atau lebih secara bersama-sama, yang mana keputusan tersebut memberikan dampak terhadap pembuatnya dimasa yang akan datang.

Pencampuran kepentingan pribadi dalam partisipasi penyusunan anggaran dapat terjadi. Berbagai perilaku individu merupakan suatu bentuk manifestasi dari nilai-nilai budaya. Budaya organisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu persepsi yang dianut oleh anggota organisasi, dimana persepsi tersebut menjadi sistem dan makna bagi anggota organisasi. Dalam Yuhertiana, Pranoto et al. (2015) budaya termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *budgetary slack*. Dimana *budgetary slack* ini merupakan salah satu bentuk perilaku disfungsional atau perilaku menyimpang. Dimana dalam konteks psikologi, perilaku disfungsional ini juga disebut sebagai abnormalitas. Abnormalitas atau dalam hal ini perilaku disfungsional merupakan tindakan berbeda dari yang khas atau yang menyimpang dari hal normal.

Kinerja pegawai merupakan hasil kerja baik kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu yang dicapai karyawan dalam melaksanakan kewajiban sesuai tanggung jawabnya, yang dipengaruhi kemampuan dan keahliannya ditambah dengan semangat dalam bekerja (Mangkunegara 2005). Keputusan seseorang yang terlibat dalam proses penganggaran turut

dipengaruhi oleh faktor psikis, kebudayaan dan alasan pribadi. Karena itu, penelitian mencoba menguji pengaruh partisipasi penganggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah sumenep dengan perilaku disfungsional sebagai variabel moderasi.

Sumenep adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya ialah Kota Sumenep. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.093.45 km² dan populasi ±1 juta jiwa. Dalam korankabar.com yang diakses tanggal 17 Maret 2016 disebutkan juga bahwa dalam proses penyusunan anggaran di kabupaten Sumenep tidak terlepas dari perilaku menyimpang yang dapat merugikan masyarakat kabupaten Sumenep. Budaya masyarakat Sumenep mempunyai banyak nilai kearifan. Masyarakat Sumenep menjunjung tinggi kekerabatan. Dalam penelitian Hofstede budaya masyarakat Sumenep termasuk jenis masyarakat kolektivisme. Dimana dalam kolektivisme, masyarakat terdiri dari individu yang saling tergantung dan memprioritaskan pada tujuan kelompok, berperilaku berdasarkan norma kelompok dalam bentuk komunal (Singelis, Triandis, Bhawuk, & Gelfand, 1995). Penelitian ini mencoba untuk menguji kontribusi aspek perilaku disfungsional pada kinerja penganggaran tahap perencanaan yang melibatkan eksekutif-dinas yang ada di Kabupaten Sumenep karena pada realitasnya dalam proses penyusunan anggaran daerah tidak terlepas dari perilaku disfungsional. Dimana perilaku disfungsional ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat selaku pengguna anggaran.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Menurut Halim & Abdullah (2006), teori keagenan berasal dari teori ekonomi, teori organisasi, teori sosiologi dan teori keputusan yang menggambarkan hubungan prinsipal dengan agen dalam menganalisis kontraktual antara dua atau lebih individu, kelompok maupun organisasi.

Teori Penetapan Tujuan

Teori penetapan tujuan adalah teori motivasi kognitif yang berdasar pada premis bahwa orang memiliki kebutuhan yang dapat diingat atau dipikirkan sebagai outcomes tertentu atau sasaran (*goals*) yang diharapkan dapat dicapai (Locke, Bryan, & Kendall, 1968).

Teori Kontijensi

Teori kontijensi menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik untuk mengatur, memimpin atau membuat keputusan suatu organisasi.

Partisipasi Anggaran

Mardiasmo (2005) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang menggambarkan dimana individu ikut dalam proses penyusunan anggaran yang berpengaruh terhadap tujuan anggaran.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan filosofi organisasi menyangkut nilai, norma dan keyakinan bersama yang menjadi ciri khas bagaimana organisasi melakukan sesuatu. Dalam praktiknya setiap penyusun anggaran dipengaruhi oleh sikap dan watak masing-masing individu yang merupakan budaya bagi individu. Individu-individu tersebut pun mempunyai kepentingan dalam proses penyusunan anggaran yang bisa menguntungkan dirinya.

Kinerja Aparat Pemerintah

Ditinjau dari sisi pemerintahan kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai seorang pegawai atas tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pimpinannya. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pencapaian dari pelaksanaan anggaran.

Perilaku Disfungsional

Penyimpangan merupakan setiap pelanggaran terhadap aturan perilaku. Perilaku dianggap menyimpang ketika kebiasaan organisasi, kebijakan atau peraturan internal dilanggar oleh individual atau kelompok yang mungkin membahayakan kesejahteraan organisasi atau masyarakat (Bennett & Robinson, 2000).

Deviant workplace behavior atau juga disebut sebagai perilaku menyimpang di tempat kerja merupakan perilaku yang melanggar norma-norma organisasi secara sengaja, dimana tindakan ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan organisasi maupun anggotanya. Fenomena *deviant workplace behavior* dapat dilihat diberbagai macam lembaga pemerintah yang menunjukkan banyak karyawan yang tidak produktif di tempat kerja, terlibat kasus penyuapan, sabotase hingga korupsi. Sehingga *deviant workplace behavior* berkaitan erat dengan nilai atau budaya yang diyakini suatu organisasi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Partisipasi Budgeting terhadap Perilaku Disfungsional

Partisipasi *budgeting* dapat dikatakan bermanfaat jika semua individu dalam organisasi terlibat tidak hanya tugas dalam pekerjaan namun juga terlibat secara emosi. Partisipasi juga dapat meningkatkan kerjasama diantara anggota dalam suatu kelompok untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga apabila partisipasi dalam penyusunan anggaran antar anggota kelompok rendah, maka akan menyebabkan anggaran menjadi bias. Partisipasi aparat pemerintah yang rendah dalam proses penyusunan anggaran dapat menyebabkan perilaku disfungsional. Pada proses ini kemungkinan aparat memasukkan elemen pembiasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi aparat dalam proses penganggaran dapat mempertinggi prospek pembiasaan anggaran (bagian dari perilaku disfungsional).

H1: Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap perilaku disfungsional.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Perilaku Disfungsional

Bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Chow, Kato, & Merchant, 1996). Nilai suatu budaya organisasi ikut mempengaruhi pengukuran kinerja yang memberikan dampak yang baik dan juga dampak terhadap perilaku disfungsional sebagai akibat dari budaya yang dianut oleh organisasi. Mengubah kultur budaya organisasi merupakan masalah yang paling utama untuk mencegah penyimpangan perilaku (Aprilisanda, Yuhertiana, & Priono, 2018).

H2: Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional.

Pengaruh Partisipasi Budgeting terhadap Kinerja Aparat Pemerintah

Salah satu faktor yang bisa meningkatkan efektifitas suatu organisasi adalah partisipasi bawahan pada proses penganggaran (Din, 2008). Dimana partisipasi penganggaran tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja bawahan. Adapun alasan yang menjadi dasar bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja adalah yang pertama teori psikologis, menyatakan bahwa dalam menetapkan tujuan partisipasi bawahan berpengaruh terhadap kinerja. Kedua, partisipasi dapat meningkatkan arus informasi antara atasan dan bawahan dalam meningkatkan, pengamatan dan pengambilan keputusan.

H3: Partisipasi *budgeting* berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah

Menurut Hofstede et.al (1990) dalam Arifin (2012), budaya organisasi merupakan nilai yang diyakini dan dimiliki oleh anggota organisasi yang tertuang dalam norma-norma perilaku individu atau kelompok organisasi ditempat kerja. Holmes dan Marsden (1996) dalam Arifin (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara partisipasi penganggaran terhadap kinerja

organisasi. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi partisipasi karyawan dalam penyusunan anggaran, maka kinerja karyawan juga semakin meningkat.

H4: Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Perilaku Disfungsional terhadap Kinerja Aparat Pemerintah

Dalam suatu proses penyusunan anggaran aparat pemerintah sangat berkepentingan. Karena aparat pemerintah adalah penyedia informasi pada saat penyusunan anggaran. Anggaran juga diperlukan oleh aparat sebagai informasi dalam mengevaluasi kinerja atas anggaran yang telah disusun. Supaya anggaran yang disusun tidak merugikan organisasi, maka aparat pemerintah harus mengerti aspek keperilakuan pada saat proses penyusunan anggaran. Karena pada saat penyusunan anggaran dapat terjadi konsekuensi yang bersifat disfungsional.

H5: Perilaku disfungsional berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Partisipasi Budgeting terhadap Kinerja Aparat Pemerintah

Dalam penelitian ini menggunakan perilaku disfungsional sebagai variabel moderating untuk meneliti hubungan partisipasi *budgeting* terhadap kinerja.

H6: Partisipasi *budgeting* berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui perilaku disfungsional.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah

Menurut Robbin's (2007) dalam (Bangun 2008) budaya organisasi adalah asumsi penting, tujuan, dan praktiknya yang dianut oleh anggota organisasi. Sehingga perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh budaya organisasi. Sistem pengukuran kinerja memberi dampak pada perilaku yang baik dan dampak pada perilaku disfungsional merupakan akibat yang timbul dari budaya organisasi yang dianut oleh organisasi.

H7: Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui perilaku disfungsional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode survei. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling purposive*. Pengujian hipotesis menggunakan alat analisis data *Partial Least Square* (PLS). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pejabat struktural yang bekerja di kantor dinas di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 16 kantor dinas. Dengan menggunakan teknik *Sampling Purposive*, maka didapatkan 317 responden. Dari 317 kuesioner yang disebar kepada responden hanya 162 kuesioner yang dapat diolah.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional
Partisipasi <i>Budgeting</i> (X1)	Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang menggambarkan dimana individu ikut dalam proses penyusunan anggaran yang berpengaruh terhadap tujuan anggaran.
Budaya Organisasi (X2)	Budaya organisasi merupakan filosofi organisasi menyangkut nilai, norma dan keyakinan bersama yang menjadi ciri khas bagaimana organisasi melakukan sesuatu.
Perilaku Disfungsional (Y1)	Perilaku disfungsional menggambarkan perilaku bawahan yang cenderung melakukan perilaku tidak etis dengan membuat laporan kinerja yang lebih baik demi mengejar kepentingan pribadi atau sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada atasannya.
Kinerja Aparat Pemerintah (Y2)	Kinerja menyatakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan pada periode tertentu dalam melaksanakan kegiatan atau kewajiban dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal: standar hasil kerja, target atau sasaran serta kriteria yang telah disepakati.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan banyak asumsi (Ghozali, 2006). Tahapan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi model PLS yang terdiri atas dua hasil pengujian yaitu:

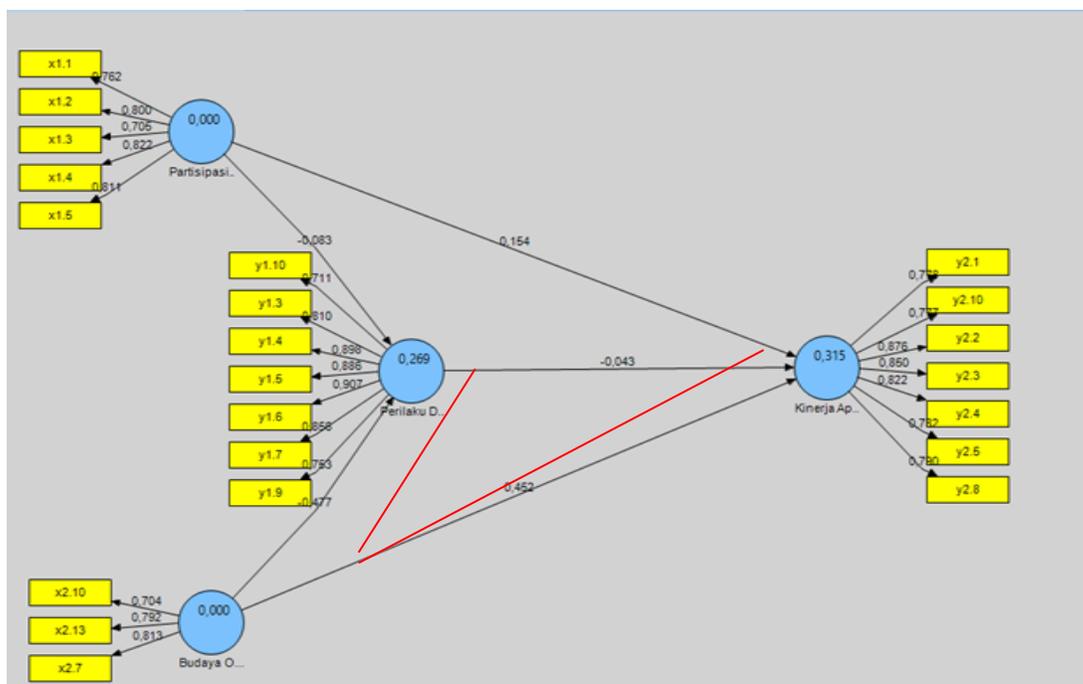
1. Model pengukuran (*outer model*). Setiap konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi dalam model pengukuran. Dari model pengukuran tersendiri akan menunjukkan hasil uji konstruk dan reliabilitas.
2. Model Struktural (*inner model*). Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R^2 untuk konstruk dependen, nilai koefisien *path* atau *t-value* tiap *path* uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *bootstrapping* partisipasi *budgeting* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional tidak terdukung. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian di dapatkan nilai T-statistic 0,745421 yang dimana lebih kecil dari pada T-table 1,96. Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional terdukung, dimana nilai T-statistic 2,898787 lebih besar dari nilai T-table 1,96. Partisipasi *budgeting* berpengaruh terhadap kinerja aparat

pemerintah daerah tidak terdukung, dapat dilihat dari nilai dari T-statistic 0,491238, nilai tersebut jelas dibawah nilai T-table 1,96.

Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah terdukung. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa nilai T-statistic dari hasil pengujian adalah 2,529441, dimana lebih besar dari T-table 1,96. Perilaku disfungsional berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah tidak terdukung seperti yang terlihat pada tabel diatas nilai T-statistic adalah 0,140703 lebih kecil dari T-table 1,96. Sedangkan partisipasi *budgeting* berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui perilaku disfungsional tidak terdukung. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai T-statistic 0,050369 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai T-table > 1,96. Hal ini berarti perilaku disfungsional belum mampu memediasi secara penuh partisipasi *budgeting* terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Begitu pula budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah melalui perilaku disfungsional tidak terdukung. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T-statistic 0,249207 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai T-table > 1,96 hal ini perilaku disfungsional belum mampu memediasi secara penuh budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Jadi efek untuk mediasi tidak terdukung. Pada Gambar 1, garis jalur yang berwarna merah menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Pembahasan

Bedasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa partisipasi *budgeting* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional tidak terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran ternyata tidak memicu bawahan untuk melakukan perilaku disfungsional dalam anggaran yang mereka susun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi *budgeting* yang melibatkan karyawan dinas Kabupaten Sumenep merupakan aktualisasi komitmen yang sebenarnya. Mereka turut menyusun anggaran demi kepentingan organisasinya dan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran dapat dikatakan aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tidak mengikutsertakan/menyertakan kepentingan pribadi dan tidak terjadi konflik kepentingan antar bawahan di organisasi dalam penyusunan anggaran.

Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional terdukung. Hal ini berarti semakin tinggi budaya organisasi maka akan meningkatkan terjadinya perilaku disfungsional dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi yang dianut oleh aparat pemerintah kabupaten Sumenep memberikan dampak terhadap perilaku disfungsional. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Supomo dan Indriantoro (1998) dalam Prawira & Wirasedana (2016) menyatakan bahwa budaya organisasi yang berorientasi pada pekerjaan mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku disfungsional, yang berarti dapat meningkatkan terjadinya perilaku disfungsional.

Partisipasi *budgeting* berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah tidak terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran ternyata tidak memicu meningkatnya kinerja aparat pemerintah daerah dalam anggaran yang mereka susun. Partisipasi *budgeting* tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumenep mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik meski tidak diikutsertakan dalam proses penyusunan anggaran.

Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumenep lebih mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Kepentingan pribadi disesuaikan dengan kepentingan organisasi. Dengan kata lain, apabila budaya organisasi mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan kinerja pegawai pula dan begitu pun sebaliknya, apabila budaya organisasi mengalami penurunan, maka kinerja pegawai pun akan mengalami penurunan.

Perilaku disfungsional berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah tidak terdukung. Perilaku disfungsional yang bisa menurunkan kinerja adalah perilaku yang melibatkan kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan organisasi tetapi tetap dilakukan oleh aparat pemerintah. Jadi meski perilaku disfungsional di lingkungan aparat pemerintah daerah meningkat, hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja yang dicapai oleh aparat pemerintah tersebut. Karena meskipun aparat pemerintah kabupaten Sumenep sering melakukan perilaku disfungsional tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Partisipasi *budgeting* berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui perilaku disfungsional tidak terdukung. Melihat partisipasi *budgeting* tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah dan setelah di uji coba menggunakan variabel mediasi perilaku disfungsional hasilnya tetap tidak berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah tetap bisa menghasilkan kinerja yang baik meski tidak diikutsertakan dalam penyusunan anggaran. Dengan kata lain, aparat pemerintah dikabupaten Sumenep meski tidak diikutsertakan dalam proses penganggaran mereka tidak menunjukkan perilaku disfungsional yang akhirnya tidak mengganggu kinerja mereka.

Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah melalui perilaku disfungsional tidak terdukung. Melihat budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah dan setelah di uji coba menggunakan variabel mediasi perilaku disfungsional ternyata hasilnya menjadi tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi yang berorientasi pada pekerjaan mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku disfungsional, yang berarti dapat meningkatkan terjadinya perilaku disfungsional budaya organisasi juga berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah secara langsung tanpa mediasi variabel perilaku disfungsional.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dapat dikatakan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah baik secara langsung maupun melalui perilaku disfungsional sebagai variabel moderasi dalam proses penganggaran. Jadi meski aparat pemerintah daerah ikut terlibat dalam proses penganggaran tidak mempengaruhi mereka untuk melakukan perilaku disfungsional dan juga tidak mempengaruhi kinerja mereka. Sehingga hal ini berimplikasi aparat pemerintah daerah tersebut tidak mempunyai konflik kepentingan dalam instansi tempat mereka bekerja.

Budaya organisasi hanya memberikan pengaruh secara langsung terhadap perilaku disfungsional dan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Sumenep. Sedangkan perilaku disfungsional tidak mampu memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah. Hal ini berimplikasi bahwa meskipun aparat pemerintah kabupaten Sumenep sering melakukan perilaku disfungsional namun tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Perilaku disfungsional tidak mampu memediasi kedua variabel independen yaitu partisipasi *budgeting* dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Hal ini berimplikasi bahwa partisipasi dan budaya organisasi aparat dalam penyusunan anggaran tidak mempengaruhi kinerja aparat meskipun melakukan perilaku disfungsional.

Dari penelitian ini terlihat bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, maka diharapkan penerapan budaya organisasi lebih ditingkatkan demi tercapainya kinerja aparat pemerintah daerah yang lebih baik dan berkualitas lagi. Namun budaya organisasi juga berpengaruh terhadap perilaku disfungsional yang mana hal ini juga perlu diperhatikan meski jika perilaku disfungsional benar-benar terjadi tetapi tidak mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian ini hanya menguji perspektif aparat pemerintah di kabupaten Sumenep sehingga hasilnya kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode penelitian eksperimen supaya hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan sebenarnya serta objek penelitian selanjutnya melibatkan lebih banyak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilisanda, I. D., Yuhertiana, I., & Priono, H. (2018). PERSEPSI DOSEN AKUNTANSI TERHADAP PRAKTIK KECURANGAN AKADEMIK PADA UPN "VETERAN" JAWA TIMUR (STUDI PADA PROGDI AKUNTANSI). *Behavioral Accounting Journal*, 1(1), 97–110. <https://doi.org/10.33005/baj.v1i1.21>
- Arifin, S. (2012). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang, Universitas Diponegoro. Skripsi.
- Bangun, W. (2008). Budaya Organisasi : Dampaknya Pada Peningkatan Daya Saing Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 8(1), 38-49.
- Batubara, H. D. A. (2014). Perilaku Eksekutif/Legislatif dalam proses penganggaran: Mengembalikan Fitrah Budaya Gotong Royong. Kompasiana.
- Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a Measure of Workplace Deviance. *Journal Of Applied Psychology*, 85(3), 349-360.

- Chow, C. W., Kato, Y., & Merchant, K. A. (1996). The use of organizational controls and their effects on data manipulation and management myopia: A Japan vs US comparison. *Accounting, Organizations and Society*, 21(2-3), 175-192.
- Din, M. (2008). Antecedent dan Konsekuensi Partisipasi Penganggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu) Program Studi Magister Sains Akuntansi. Semarang, Universitas Diponegoro Tesis.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64.
- Locke, E. A., Bryan, J. F., & Kendall, L. M. (1968). Goals and Intentions as Mediators of the Effects of Monetary Incentives on Behavior. *Journal of Applied Psychology*, 52(2), 104.
- Mangkunegara, A. P. (2005). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prawira, I. G. N. P. H., & Wirasedana, I. W. P. (2016). Budaya Organisasi sebagai Prediktor Partisipasi Penganggaran dan Implikasinya pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 144-171.
- Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. P. S., & Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. *Cross-Cultural Research*, 29(3), 240-275.
- Yuhertiana, I., et al. (2015). Perilaku Dysfungsional Pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran. *JAAI*, 19(1), 25-38.